

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian Suryani (2007) populasi dan sampel dari penelitiannya adalah perusahaan-perusahaan *Food and Beverages* yang *listing* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 20 perusahaan selama dua tahun yaitu tahun 2004 dan 2005. Variabel yang dikaji dalam penelitiannya adalah *profile* perusahaan (X1), *Size* perusahaan (X2) dan luas pengungkapan sukarela (Y). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang ada dalam penelitiannya merupakan data yang bersumber dari laporan pengungkapan sukarela tahunan perusahaan (*annual report*) yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis dengan regresi berganda dengan uji asumsi klasik. Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ menunjukkan hasil sebagai berikut: $R^2 = 0,408$; $F = 12,743$; signifikansi = 0,000. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif antara *profile* perusahaan (X1) dan *size* perusahaan (X2) terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan *Food and Beverages* (Y). Secara parsial porsi *profile* perusahaan mempengaruhi tingginya luas pengungkapan sukarela perusahaan *Food and Beverages*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,021 kurang dari 0,05 sehingga hasil uji ini dinyatakan H_a diterima. Sedangkan *size* perusahaan mempunyai pengaruh lebih

kecil terhadap tingginya luas pengungkapan sukarela perusahaan *Food and Beverages*. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,041 kurang dari 0,05 sehingga hasil uji dinyatakan H_a diterima. Hasil penelitian Suryani (2007) diharapkan agar pihak manajemen perusahaan dapat memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas dan menyesuaikan dengan keputusan Bapepam No 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sehingga diharapkan pengungkapan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya. Bagi para investor, pemerintah, kreditur, karyawan dan masyarakat umum untuk memprediksi *return* sahamnya dapat memperhatikan faktor *profile* maupun *size* perusahaan. Disamping kedua faktor tersebut, sebaiknya memperhatikan faktor lain, misalnya faktor likuiditas, profitabilitas, leverage, porsi kepemilikan saham dan faktor-faktor yang lainnya.

Penelitian Donny (2008) mengenai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam suatu laporan keuangan tahunan akan menyediakan pengertian yang lebih mendalam tentang beberapa praktek pengungkapan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan tentang pengaruh besaran perusahaan, likuiditas, solvabilitas, kepemilikan publik, dan umur perusahaan terhadap luasnya pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada periode 31 desember 2006. Sebanyak 40 perusahaan dari tujuh sektor yang ada di BEI, diantaranya adalah *Agriculture*;

Minning; Basic Industry and Chemicals; Miscellaneous Industry; Consumer Goods Industry; Infrastructure, Utilities and Transportation; dan Trade, Service and Investment telah diteliti menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan software SPSS, dimana variabel independennya meliputi besaran perusahaan, likuiditas, solvabilitas, kepemilikan publik, dan umur perusahaan yang diprediksikan memiliki pengaruh terhadap luas *voluntary disclosure* yang merupakan variabel dependen dalam penelitiannya. Hasil penelitian Donny (2008) menunjukkan bahwa hanya likuiditas dan solvabilitas yang berpengaruh secara signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap luas *voluntary disclosure*, sedangkan besaran perusahaan, kepemilikan publik, dan umur perusahaan tidak terbukti mempengaruhi luas *voluntary disclosure*. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Selain daripada itu, koefisien determinasi Adjusted R Square (R^2) juga menunjukkan nilai sebesar 0,319 dan itu berarti 31,9% dari luas *voluntary disclosure* dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen.

Penelitian Rini (2008) bertujuan untuk mengetahui luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan dan mengetahui hubungan variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan (*size*), *profitabilitas*, *leverage*, tingkat *likuiditas* dan kepemilikan saham publik terhadap luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan. Sampel penelitiannya adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 selama 6 kali periode pemilihan berturut-turut

(februari 2005 - januari 2008) atau termasuk dalam Indeks LQ-45 berturut-turut selama tahun 2005, 2006 dan 2007. Luas *voluntary disclosure* merupakan variabel independen, diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh suripto (1998) sebanyak 33 item. Jumlah sampel dalam penelitiannya sebanyak 18 perusahaan, pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Pengujian data menghasilkan Luas *voluntary disclosure* laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan hasil dari uji regresi parsial (uji-t) dalam penelitiannya yaitu ukuran perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, dan tingkat *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary Disclosure*) dan kepemilikan saham publik merupakan satu satunya variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary Disclosure*).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien, dalam interpretasi yang lebih luas, pengungkapan terkait dengan informasi baik yang terdapat dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan (*supplementary communication*) yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan di masa dating, prakiraan keuangan operasi, serta informasi lainnya (Puguh, 2002).

Alasan utama mengapa suatu pengungkapan diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu perencanaan dalam pengambilan keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan investasi, investor memerlukan tambahan informasi yang tidak hanya informasi tambahan tapi informasi non keuangan. Kebutuhan itu didorong oleh adanya perubahan manajerial yang menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan investor akan informasi baru yang mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi kualitatif dipandang memiliki nilai informasi yang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi, bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi, dan tindakan apa yang akan diambil oleh manajemen terhadap fenomena tersebut (Puguh, 2002).

Menurut Suryani (2007) bahwa kualitas informasi dalam laporan keuangan sangat berkaitan dengan tingkat keluasan pengungkapan dalam laporan tahunan. Berpegang pada peraturan atau regulasi primer yaitu surat keputusan ketua BAPEPAM No. 38/PM/1996, terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan, yakni:

1. *Mandatory disclosure*

Dalam UU No. 8/PM/1995 *mandatory disclosure* yaitu pengungkapan yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah. Bagi emiten setelah go public pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib setelah going public dapat terjadi selama perusahaan masih merupakan perseroan terbuka.

2. *Voluntary disclosure*

Menurut Suripto (1999) *voluntary disclosure* yaitu pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan pemerintah sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang memberi kebebasan bagi manajemen untuk menentukan serta memelihara jenis informasi, baik yang bersifat finansial atau non finansial.

Suryani (2007) mengatakan bahwa luas pengungkapan di setiap negara berbeda-beda. Bagi negara yang regulasinya lebih ketat, tingkat pengungkapan laporan tahunan relatif lebih luas dibandingkan dengan negara yang kurang ketat regulasinya. Menurut Belkaouli (2000 : 219) dalam Suryani (2007) tujuan dari pengungkapan atas laporan keuangan antara lain:

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan item-item yang belum diakui serta menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut.
2. Untuk menyediakan informasi dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko, dan returnnya.
3. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut

harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut (Aniek : 2006). Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Yang paling umum digunakan dari ketiga konsep diatas adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat positif. Pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan

2.2.2. Pelaporan Pengungkapan Sukarela atas Laporan Keuangan (*Voluntary Disclosure*)

Ada 2 jenis pungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal, yang pertama adalah ungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus di ungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu Negara. Sedangkan yang kedua adalah ungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola

oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Hardhina, 2007).

Disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut (Aniek :2006).

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu dalam Na'im dan Rakhman (2000 : 73) dalam deni (2005) dan Hartanti (2005) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen, ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu

1. Pengungkapan cukup (*Adequate disclosure*)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar

oleh investor.

2. Pengungkapan wajar (*Fair disclosure*)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung menyiratkan suatu etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan penuh (*Full disclosure*)

Pengungkapan penuh menyangkut penyajian informasi yang relevan. Bagi sebagian orang pengungkapan penuh berarti penyajian informasi secara berlimpah sehingga tidak tepat. Menurut mereka, terlalu banyak informasi akan membahayakan. Karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan keuangan sulit ditafsir.

Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Menurut Anis Chariri dan Imam Ghozali (2000 : 248) dalam Suryani (2007) metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi atas laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. bentuk dan susunan laporan yang formal.
2. terminology dan penyajian yang relevan.
3. informasi sisipan
4. catatan kaki.
5. ikhtisar tambahan dan skedul-skedul.

6. komentar dalam laporan auditor.
7. pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris.

Menurut Aniek (2006) pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap.

Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) dalam Anggarini (2006), mereka mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) yang menghendaki orang lain (*maneger*) untuk melaksanakan jasa dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya kontrak (*contracting costs*), dan visibilitas politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi

visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sukarela dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat (Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Retno, 2005).

Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dilakukan mengingat alasan-alasan sebagai berikut (Suryani : 2007) :

1. Pemerintah sudah menetapkan aturan tentang *mandatory disclosure* sehingga perusahaan publik dimaksudkan menaati peraturan tersebut
2. Pemerintah Indonesia menunjuk BAPEPAM untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut terhadap perusahaan
3. Semakin meningkatnya kesadaran bagi manajemen perusahaan untuk membuka diri dalam melaksanakan *disclosure* pada laporan tahunan, guna mendukung strategi perusahaan.

Pengungkapan dalam laporan keuangan di Indonesia baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No: kep-38/PM/1996 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah ataupun lembaga profesional (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi

kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen (Aniek : 2006).

Pengungkapan sukarela dan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan masalah yang timbul terutama dalam kaitannya dengan hal-hal yang tidak dapat diukur dengan menggunakan bentuk pengukuran yang telah digunakan dalam akuntansi (Puguh, 2002).

Pengungkapan dalam laporan keuangan di Indonesia baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No: kep-38/PM/1996 juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pengungkapan informasi yang diatur oleh pemerintah ataupun lembaga profesional (dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pengungkapan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan yang telah publik. Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen (Aniek ; 2006).

2.2.3. Prosentase Kepemilikan Manajemen

Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Hardhina, 2007).

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Anggraini, 2006).

Penelitian Ardi dan Lana (2007) mengatakan Kepemilikan manajemen perusahaan adalah perbandingan jumlah antara pemegang saham publik dengan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam mendapatkan modal, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menjual sahamnya. Semakin banyak saham dijual maka semakin banyak pula saham beredar di masyarakat.

Prosentase kepemilikan manajerial yaitu prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur dan manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan erat kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik serta antara pemilik (melalui manajemen) dengan kreditur. Dengan pengungkapan yang lebih luas, manajemen berusaha menurunkan potensi konflik yang akan menaikkan biaya pengawasan (Renita : 2006).

Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen sangat berperan penting dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Manajemenlah yang menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Hasil kerja manajemen ini akan

dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban ini dapat diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga diperkirakan jumlah kepemilikan saham manajerial akan dapat memengaruhi pengungkapan sukarela laporan keuangan perusahaan.

Dengan demikian selain untuk memperoleh modal melalui penjualan saham kepada masyarakat, dengan melakukan pengungkapan sukarela dalam perusahaan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan *image* perusahaan sehingga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan manajemen perusahaan lebih besar.

H₁: Adanya pengaruh jumlah prosentase kepemilikan manajemen dengan kebijakan pengungkapan sukarela laporan keuangan.

2.2.4. *Financial Leverage*

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling; 1976 dalam Retno; 2005). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk

melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu (rasio utang/ekuitas), *interest coverage*, modal kerja dan ekuitas pemegang saham, oleh karena itu semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya .

Ardi dan Lana (2007) menyatakan *leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor.

Semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio hutang/ekuitas) semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi, supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan sukarela (Hardhina, 2007)

Dengan demikian *leverage* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah besarnya hutang perusahaan yang dibandingkan dengan total modal perusahaan .

H₂: adanya pengaruh pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan tingkat *leverage*.

2.2.5. Biaya Politis

Biaya politis merupakan biaya yang timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Proses pengalihan kekayaan tersebut biasanya menggunakan informasi akuntansi, seperti laba. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Manajer mempunyai kecenderungan untuk mengecilkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi biaya politis yang potensial (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Lasdi, 2008).

Lasdi; 2008 juga mengatakan bahwa *Political costs hypothesis* mengenalkan dimensi politis ke dalam konservatisme akuntansi. Ukuran perusahaan juga dapat menimbulkan biaya politis. Perusahaan yang sangat besar didirikan dengan standar kinerja dan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan juga biaya politis. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan berskala besar untuk menerapkan konservatisme akuntansi.

Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan sukarela sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah (Watt dan Zimmerman; 1990

dalam Scott; 1997 dalam Retno). Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politik yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, ukuran perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan.

Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*Size*) terhadap kualitas ungkapan, namun sebenarnya landasan teoritis mengenai pengaruh *size* ini tidaklah terlalu jelas. Walaupun begitu, berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil dan *Size* perusahaan merupakan variabel independen yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan (Hardhian, 2007).

Brigham dan Houston (2001 : 119) dalam Hartanti (2005) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dengan demikian dapat \ dipahami bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* akan melakukan pengungkapan sukarela lebih banyak dibandingkan perusahaan yang *low-profile*. Roberts; (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) dalam Retno (2005) mendefinisikan industri yang *high-profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Retno (2005) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi sukarela atas laporan keuangan karena hal ini akan meningkatkan *image* perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) dalam Retno (2005) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang *high-profile*. Sedangkan Diekers dan Perston (1977) dalam Hackston dan Milne (1996) dalam Retno (2005) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang *high-profile*. Patten (1991) dalam Hackston dan Milne (1996) dalam Reno (2005) mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang *high-profile*. Atas dasar pengelompokkan di atas, penelitian ini kemudian mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif,

barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri yang *high-profile*.

H₃: adanya pengaruh pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan ukuran perusahaan

H₄: adanya pengaruh pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan tipe industri

2.2.6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Ardi dan Lana; 2007).

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan sukarela atas laporan keuangan kepada pemegang saham (Heinze; 1976 dalam Hackston dan Milne; 1996 dalam Retno; 2005). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan sukarela (Bowman dan Haire; 1976 dan Preston; 1978 dalam Hackston dan Milne; 1996 dalam Retno; 2005). Hackston dan Milne (1996) dalam Retno (2005) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan sukarela. Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Retno (2005) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat sosial menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Retno (2005)

mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Menurut Brigham dan Houston (2001:89) dalam Hartanti (2005) profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Sedangkan Horne dan Wachowicz (1997:147) mengatakan rasio profitabilitas menghubungkan laba dengan penjualan dan laba dengan investasi yang secara bersama-sama keduanya menunjukkan efektifitas keseluruhan operasi perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2000:83) rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu

Hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan sukarela adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan (Hardhina, 2007).

H₅: adanya pengaruh antara pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan tingkat profitabilitas perusahaan.

2.3. Kerangka Berpikir

Populasi dan sample dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

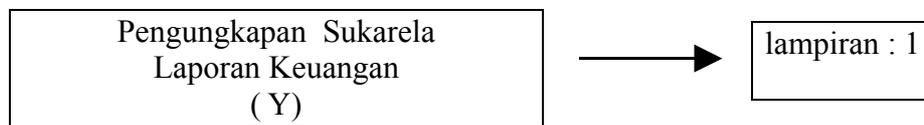
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 - 2008. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive jugment sampling* yakni tipe pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan tertentu, dan analisis yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan analisis linier berganda yang akan di uji dengan beberapa uji asumsi klasik.

Dari uraian diatas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

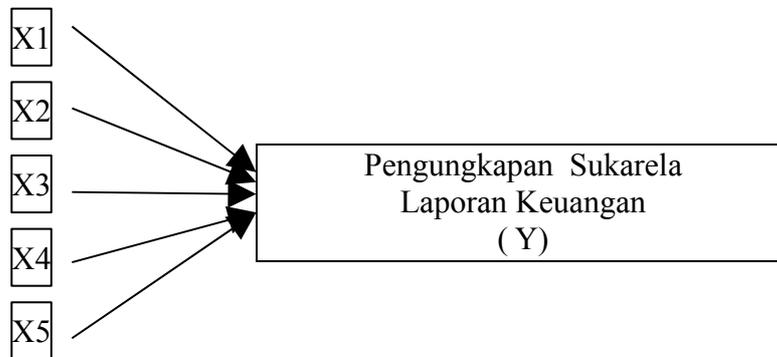
Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Pengukuran variabel ini dengan mengukur pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan yang dilakukan dengan pengamatan mengenai ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan keuangan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1.

Pengungkapan sukarela atas laporan keauagan menunjukkan seberapa luas butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. Mengembangkan daftar item ungkapan sukarela dan membuat indeks pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan sampel. Dalam penelitian ini pengembangan pengungkapan sukarela dilakukan berdasarkan pengembangan daftar item pengungkapan sukarela penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di Indonesia. Indeks pengungkapan sukarela diperoleh dengan cara membandingkan skor yang

diperoleh perusahaan dengan skor yang mungkin dapat diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan diberi skor 1 apabila mengungkapkan item informasi dalam instrument dan diberi skor 0 apabila tidak mengungkapkan. Dengan demikian, semakin banyak elemen informasi dalam instrument dipenuhi oleh suatu perusahaan, semakin besar indeks pengungkapan sukarela perusahaan tersebut (lampiran 1).



Pada pengukuran statistik masing-masing hipotesis tersebut diatas akan diuji secara simultan dan pada akhirnya akan diuji dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan beberapa asumsi uji klasik.



Keterangan :

Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan (Y)

Prosentase Kepemilikan Manajemen (X_1)

Financial Leverage (X_2)

Biaya Politis yang diproksi dengan :

- Ukuran Perusahaan (*Size*) (X_3)
 - Tipe Perusahaan (IND) (X_4)
- Profitabilitas* (X_5)

2.4. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesis untuk mendukung jawaban atas permasalahan yang ada. Perumusan hipotesis tersebut adalah :

H₁ : adanya pengaruh jumlah prosentase kepemilikan manajemen dengan kebijakan pengungkapan sukarela laporan keuangan.

H₂ : adanya pengaruh pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan tingkat *leverage*.

H₃ : adanya pengaruh antara pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan ukuran perusahaan (*Size*).

H₄ : adanya hubungan positif antara pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan tipe industri.

H₅ : ada hubungan positif antara pengungkapan sukarela laporan keuangan dengan tingkat profitabilitas perusahaan.